

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM)

Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) adalah program bantuan pemerintah dalam rangka membantu masyarakat dalam mempertahankan daya beli rumah tangga miskin dan rentan agar terlindungi dari dampak kenaikan harga akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM). Dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 yang didalamnya terdapat sejumlah dana kompensasi dari kenaikan harga BBM bersubsidi.

Penerima Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) ini adalah 15,5 juta rumah tangga dengan tingkat sosial-ekonomi terendah yang diberikan secara objektif, terdapat dalam Basis Data Terpadu (BDT) hasil survei Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS) 2011, dan telah disahkan oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat RI (Kemenko Kesra).

Pendataan penetapan rumah tangga tersebut berlangsung pada bulan Juli hingga Desember 2011. Pelaksana survei ini adalah Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) yang diketuai Wakil Presiden RI. Basis Data Terpadu (BDT) berisi data terperinci hingga nama dan alamat. Data hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) itu mencakup 40% keluarga yang berperingkat paling tidak sejahtera di Indonesia. Pemingkatan dilakukan dengan menggunakan beberapa variabel penentuan rumah tangga miskin sesuai karakteristik daerah di Indonesia.

Jumlah bantuan tunai yang diberikan yakni sebesar Rp 150.000,- per bulan, selama empat bulan, dibayarkan selama dua kali yakni Juni/Juli dan September 2013-2014. Pembagian/pencairan dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) dilakukan melalui loket pembayaran yang berada di Kantor Pos terdekat. Untuk wilayah terpencil dan tidak terdapat Kantor Pos, maka PT Pos Indonesia akan mendatangi lokasi tersebut dan membuka loket pembayaran khusus.

Adapun masyarakat yang berhak menerima Kartu Perlindungan Sosial tapi tidak mendapatkan dan/atau sebaliknya, kiranya dapat langsung menghubungi Kepala Desa/Lurah setempat.

Pada tahun 2015, Program KPS dihentikan dan digantikan dengan Program 3 Kartu Sakti yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Pendistribusian KIS ditargetkan sebanyak 88,2 juta penerima, KIP sebanyak 17,9 juta penerima, dan KKS sebanyak 15,5 juta penerima.

BLSM yang digantikan dengan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) menggunakan anggaran sebesar Rp 6,2 triliun dan setiap keluarga akan mendapatkan Rp 200.000,- per bulan. Kartu ini akan diisi setiap 2 bulan. Program baru dari

Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wakil Presiden Jusuf Kalla ini menyoar langsung masyarakat kelas bawah dalam menghadapi kondisi ekonomi. Penanggulangan kemiskinan melalui 3 Kartu Sakti ini merupakan Agenda Prioritas Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Nawa Cita. Program Kartu Sakti ini tercatat dalam janji Nawa Cita poin 5 yaitu “Kami akan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia”.

Pembagian Kartu Sakti sudah dimulai pada akhir 2014 dan awal 2015 dengan anggaran berdasarkan kementerian terkait dalam APBN dan realokasi dari subsidi BBM. Kartu Sakti didistribusikan langsung ke sejumlah daerah se-Indonesia, mulai dari Jakarta, Sulawesi, Kalimantan, Jawa Timur, Papua, dan daerah-daerah lainnya.

Dimohon dengan hormat para pelapor untuk memahami penjelasan ini. Jika terdapat hal yang kurang jelas mengenai permasalahan di lapangan, silakan menghubungi call center pengaduan masyarakat secara online milik Kementerian Sosial c.q. Inspektorat Jenderal pada:

Website : dumasonline.kemsos.go.id

Email : dumasonline@kemsos.go.id

Telepon : (021) 3103614

Salam,

Kementerian Sosial